

# **KONTRIBUSI SUBSIDI LANGSUNG TUNAI DALAM MENOPANG KEBUTUHAN HIDUP MASYARAKAT MISKIN DI MEDAN LABUHAN SUMATERA UTARA**

**ARMANSYAH  
SAPRINAL MANURUNG**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email : sm\_zuhro@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), mengakibatkan sebagian besar kondisi hidup masyarakat mengalami keterpurukan terutamanya masyarakat miskin. Ini disebabkan terjadinya kenaikan biaya-biaya kebutuhan dasar masyarakat seperti biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Data Indef dan SHR memperlihatkan jumlah orang miskin di Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,7 % dari 16,7 % (Penelitian 2005). Walaupun pemerintah memberikan kompensasi kenaikan BBM salah satunya melalui Subsidi Langsung Tunai, tetap tidak memberikan dampak positif bagi perbaikan kondisi hidup masyarakat miskin.

Hasil penelitian di Kecamatan Medan Labuhan, memperlihatkan pendistribusian Subsidi Langsung Tunai tidak memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kondisi hidup mereka. Adapun efisiensi pendistribusian anggaran dana Subsidi Langsung Tunai terhadap masyarakat miskin di Kecamatan Medan Labuhan melalui tiga tahap senantiasa mengalami selisih, sebab dana yang tersedia dengan realisasi dana yang didistribusikan sering mengalami kelebihan akibat ada sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan Subsidi Langsung Tunai. Sedangkan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah menerima Subsidi Langsung Tunai kondisi kehidupan rumah tangga mereka tidak berubah atau tetap miskin.

Kata kunci : Kemiskinan, Subsidi langsung tunai, Bahan bakar minyak,  
Rumah tangga miskin.

## **PENDAHULUAN**

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 1 Oktober 2005 telah memberikan pengaruh psikologis bagi seluruh lapisan masyarakat, sebab telah terjadi peningkatan berbagai biaya-biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti : kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan. Disamping itu juga pada aktivitas ekonomi terjadi kenaikan biaya operasional perusahaan, transportasi, sedangkan dalam aspek sosial akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran, kejahatan.

Menurut survei yang dilakukan Koalisi Pendidikan, sebelum kenaikan harga BBM kebutuhan biaya pendidikan untuk anak Sekolah Dasar (SD) setiap tahun mencapai Rp 700.000,-/orang, untuk SMP Rp 1.000.000,-/orang, dan SMA Rp 1.500.000,-/orang, adanya kenaikan harga BBM tentu kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan akan meningkat. Adanya kompensasi yang diberikan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk pendidikan gratis sebesar Rp 5,6 triliun yang disalurkan kepada 13 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin, secara umum tentu tidak dapat mencukupi sebab pemerintah tidak memperhitungkan biaya transportasi, seragam sekolah, dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang kesehatan alokasi dana kompensasi yang disalurkan sebesar Rp. 2,1 triliun digunakan untuk kartu kesehatan keluarga miskin sebesar Rp. 5.000/orang, bila diperhitungkan besarnya penerimaan kompensasi kesehatan tersebut yang dipergunakan untuk rawat jalan, rawat inap, termasuk cuci darah dan operasi jantung tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. (Investor Daily Online, 2006).

Kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Sebab akan terjadi sensitifitas kenaikan harga-harga komoditi dan kebutuhan pokok rumah tangga. Kenaikan harga tersebut akan menimbulkan beban yang cukup berat bagi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, sehingga peluang terjadinya gizi buruk, busung lapar, diare dan sebagainya sangat rentan terjadi. (Basri, 2006)

Dampak kenaikan harga BBM terhadap ke tiga aspek yang dikemukakan di atas secara umum telah meningkatkan jumlah angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sebab dampak negatif kenaikan harga BBM jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak positif pemberian kompensasi kepada masyarakat. Menurut Oktaviani kenaikan harga BBM telah menyebabkan aktivitas perekonomian menurun secara umum dan upah riil *unskilled labor* menurun secara drastis. Kita tahu bahwa orang miskin pada umumnya masuk ke kategori pekerja yang tidak trampil, artinya kenaikan harga BBM tidak hanya menyebabkan semakin besarnya kemiskinan, tetapi juga memperlebar disparitas pendapatan antara pekerja trampil dan tidak trampil. (Sugema, 2006)

Berdasarkan pendapat di atas, pemerintah tetap pada kebijakan awal yaitu berusaha meringankan beban biaya hidup dengan cara memberikan bantuan berupa Subsidi Langsung Tunai (*Cash Transfer*). Pemberian subsidi dilakukan secara langsung kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Namun bila dikalkulasikan dengan kenaikan BBM yang rata-rata mencapai 100% dengan penyediaan dana kompensasi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 17,8 triliun. Ini didasarkan pada asumsi pemerintah bahwa Subsidi Langsung Tunai (*Cash Transfer*) BBM dapat mengurangi angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, tetapi realitas di lapangan menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat miskin terus bertambah. Menurut data Bank Dunia lebih separuh penduduk Indonesia tergolong miskin, sensus sosial ekonomi BPS pertanggal 21 September 2005 terdapat sekitar 15,5 juta penduduk miskin, data dari Departemen Kesehatan jumlah rakyat miskin berkisar antara 30 juta - 60 juta jiwa. (Soekardi, 2006).

Bila melihat kondisi di atas dapat disimpulkan, kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah melalui Subsidi Langsung Tunai (*Cash Transfer*) BBM

untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan umum dan sebagainya belum terbukti secara signifikan mampu menopang beban kebutuhan hidup masyarakat miskin. Maka dalam hal ini perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan dampak langsung bagi masyarakat terhadap dana kompensasi yang mereka terima dalam usaha menopang kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai kontribusi Subsidi Langsung Tunai BBM dalam menopang kebutuhan hidup masyarakat Medan Labuhan (Sumatera Utara). Menurut penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Camat Medan Labuhan (Sumatera Utara) jumlah masyarakat miskin di Medan Labuhan sebelum terjadi kenaikan BBM per 1 Oktober 2006 dari 6 kelurahan sebanyak 167 Kepala Keluarga, data terakhir menunjukkan jumlah masyarakat miskin dengan merujuk pada masyarakat yang menerima Subsidi Langsung Tunai setelah kenaikan harga BBM meningkat sebanyak 249 Kepala Keluarga, ini menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin di Medan Labuhan sebesar 32,93 %.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Subsidi**

Menurut Spencer & Amos (Handoko dan Patriadi, 2006) subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*)

Suparmako (2003) mengemukakan, subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa subsidi merupakan suatu pengeluaran yang dianggarkan pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas yang mereka lakukan dalam mencapai yang maksimal. Pada masyarakat subsidi yang dilakukan agar pendapatan riil mereka dalam mengkonsumsi kebutuhan pokok dapat terjangkau, sementara pada perusahaan dimana kegiatan produksi yang mereka lakukan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Keberadaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 yang ditetapkan pemerintah dapat dikemukakan pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**  
**Dana Kompensasi Subsidi BBM 2005 (miliar rupiah)**

Jenis	Jumlah Sasaran	Total Dana Program*)	Dana APBN 2005	Dana Kompensasi
Beasiswa	9,69 juta siswa	5.601,5	1.467,3	4.134,2
Jaminan Kesehatan	36,1 juta penduduk miskin	2.176,7	1.000,0	1.176,7
Beras Murah	8,36 juta KK Miskin	5.203,5	4.673,5	530,0
Infrastruktur pedesaan	11.140 Desa Miskin	3.342,1	0,0	3.342,1
Subsidi Rumah Sehat Sederhana	Pembangunan 33 twinblok	600,0	200,0	400,0
Pelayanan social	2.800 Panti	250,0	0,0	250,0
Dana bergulir Usaha Mikro	96 ribu pengusaha mikro	200,0	0,0	200,0
Pelayanan Kontrasepsi KB	11,8 juta PUS kel miskin	100,0	0,0	100,0
Pelayanan BBM untuk Nelayan	Nelayan dan masyarakat pesisir	235,0	0,0	235,0
Dana Koordinasi Prog, Monitoring, evaluasi		132,0	0,0	132,0
Jumlah Total		17.840,8	7.340,8	10.500,0

\*) Termasuk Pengendalian-Pengamanan Program (*Safeguarding*)

Sumber: MenPPN/Bapenas (*Hady Sutjipto, 2006*)

### **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia, pada dasarnya disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki sebagian besar kelompok masyarakat dalam mengakses sumber daya pembangunan. Keterbatasan peluang ini disebabkan oleh hambatan internal kelompok miskin, terutama akibat adanya konstelasi struktur ekonomi dan politik yang otoritarian dan tidak berpihak pada golongan lemah.

Terbentuknya struktur ekonomi dan politik dalam suatu pemerintah di Indonesia diakibatkan oleh adanya pola insentif institusional yang bersifat mencari keuntungan pribadi/golongan (*rent seeking behaviour*), otoriter, kapitalis dan sentralistik. Terciptanya struktur politik tersebut diwujudkan dalam bentuk sentralitas kekuasaan serta pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh sekelompok orang serta untuk kepentingan segelintir orang, sedangkan dalam struktur ekonomi diwujudkan dalam bentuk monopoli dan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak seluruh lapisan masyarakat dalam memilikinya.

Tahun anggaran 1999/2000 kebijakan penanggulangan kemiskinan pernah dilakukan berupa program perluasan JPS yang terdiri dari berbagai komponen, seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Dana Bantuan Operasional Pemeliharaan SD/MI, Bantuan Beasiswa Sekolah dan Dana Bantuan Operasional Pemeliharaan Puskesmas. Namun usaha yang

dilakukan tidak memberikan pengaruh secara signifikan bagi pengurangan kemiskinan bagi masyarakat.

Menurut BPS Kriteria kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. BKKBN mengemukakan kriteria kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila : tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya; seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari ; seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah; tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Sedangkan Bank Dunia mengemukakan criteria kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1,00 per hari (Makmun, 2003).

Sumodiningrat (2002) mengemukakan “masyarakat miskin ditandai dengan ketidak berdayaan/ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal : memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*); melakukan usaha produktif (*unproductiveness*); menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*) ; menentukan nasib dirinya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistic (*vulnerability*) dan; membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu : (1) kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*) ; rendahnya kemampuan (*low of capabilities*); (3) kurangnya jaminan (*low-level of security*) ; (4) ketidak berdayaan (*low of capacity or empowerment*) (Makmun, 2003). Robinson (2000) mengemukakan “pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana”.

### **Penanggulangan Keluarga Miskin**

Secara garis besar strategi dalam usaha menanggulangi kemiskinan didasarkan dapat dilakukan dengan cara memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan serta dalam mengakses pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan keberdayaan ini dilakukan dengan memperkokoh usaha pertanian ladang, peternakan dan konservasi alam yang merupakan penyangga ketahanan pangan mereka.

Di samping itu perlu dilakukan upaya penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi keluarga miskin untuk beralih dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Upaya ini dilakukan dengan mempermudah akses keluarga miskin ke sumber modal usaha, teknologi dan informasi yang diperlukan. Menumbuhkan kembangan sektor-sektor non pertanian yang ‘dekat’ dengan keluarga miskin (kerajinan rakyat, perdagangan kecil-sektor informal, dan lain-lain) diharapkan dapat menjadi penyangga pangan keempat setelah usaha tani/ladang, usaha peternakan dan stok pangan non budidaya di hutan.

Upaya tersebut dapat berupa peningkatan pemberdayaan keluarga miskin ini dikaitkan dengan upaya pemberdayaan komunitasnya (masyarakat desa/

kelurahan) agar mampu membantu warganya mengatasi masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya. Untuk tujuan ini, falsafah yang diacu oleh setiap program pembangunan di propinsi ini adalah “membangun dari apa yang ada dan dimiliki oleh rakyat”, suatu filosofi yang secara implisit mengakui pentingnya memperhatikan konteks lokal. Adanya reposisi peran pihak-pihak ‘*luar desa*’ (pemerintah, LSM, kalangan dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain), dari semula sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan merupakan salah satu cara penanggulangan kemiskinan.

Dalam merealisasikan hal di atas maka diperlukan suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. “Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya” (Mubyarto, 2001).

Publikasi Bank Dunia *Indonesia Constructing a New Strategy for Poverty Reduction* Oktober 2001 berisi pembahasan komprehensif tentang agenda penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*) di Indonesia. Salah satu tema yang dikemukakan adalah perlunya memperluas definisi, fakta-fakta dan tujuan-tujuan dari program anti kemiskinan. Selain “pujian” bahwa sampai dengan krisis 1997-1998 Indonesia mampu mencapai hasil “spektakuler” dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, Bank Dunia juga memberikan kritik bahwa pendekatan yang diterapkan Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan terlalu menitikberatkan pada target-target angka.

Garis kemiskinan (*poverty line*) misalnya, ditekankan pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam arti yang sangat sempit. Target angka dikombinasikan dengan pendekatan pembangunan yang bersifat atas-bawah (*top-down approach*) telah mengesampingkan banyak dimensi kemiskinan yang meskipun sulit diukur, tetapi sangat penting. Dengan hanya melihat mereka yang secara statistik masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan, pendekatan ini menyempitkan ruang lingkup kemiskinan dan menjauhkan dari realitas penduduk miskin yang lebih dinamis.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.

Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.

Mencermati realita perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi global, Sjahrir (2001) mengemukakan bahwa, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Untuk itu Bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain: (1) semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi), (2) pengangguran yang semakin membengkak (apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual), (3) kemiskinan struktural yang semakin memilukan, (4) utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri, dan (5) pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Hal ini akan mempengaruhi kondisi sosial politik dan semakin rawannya desintegrasi bangsa, serta potensi konflik atau kerusuhan yang terjadi di tingkat masyarakat lapisan bawah (*grass-root*) cenderung semakin terbuka.

Subsidi Langsung Tunai bukanlah program pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sementara dan konsumtif. Kebijakan dana kompensasi BBM menimbulkan berbagai problematika sosial tersendiri. Dampak yang sangat besar dari kebijakan ini adalah dampak sosial. Walaupun dampak ini tidak mudah untuk dikuantitatifkan, tetapi kebijakan pasif dalam melakukan transfer kemiskinan akan menyimpan potensi yang besar untuk menyulut kecemburuan sosial, merusak tatanan dan ikatan sosial dilevel bawah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dartanto (2006) kasus penyaluran Raskin disebuah desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa ketika raskin hanya diberikan kepada kelompok miskin ternyata menimbulkan kecemburuan bagi kelompok yang nyaris miskin dan tidak miskin. Permasalahan lain yang muncul belakangan ini adalah banyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima dana kompensasi, salah sasaran, keributan antar warga, pengrusakan kantor pos dan gedung kelurahan, mati berdesak-desakan saat pengambilan SLT, ketua RT bunuh diri, warga bunuh diri, dan lain-lain.

Menurut Suledale upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu *"berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri"*. Ini berarti pula *pihak luar* harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat (Investor Daily Online, 2006).

Upaya menyeragamkan penanggulangan kemiskinan menurut model tertentu yang dikemukakan para ahli ekonomi pembangunan hanya akan menemukan kemungkinan mengalami kegagalan dan tidak akan mencapai sasaran secara efektif. Untuk itu perlu dilakukan upaya pembenahan secara terus-menerus dalam menetapkan kebijakan untuk penanggulangan masyarakat miskin, serta meninggalkan kebijakan yang kontrak produktif terhadap realitas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin dewasa ini.

### **Dampak Kenaikan BBM Terhadap Keluarga Miskin**

Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak yang simultan terhadap berbagai sistem perekonomian di Indonesia. Sebab BBM merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Sehingga terjadinya kenaikan harga BBM akan memberikan dampak terhadap inflasi, kemiskinan, sosial dan keamanan.

Akibat harga BBM yang naik disebabkan berkurangnya subsidi yang diberikan pemerintah, mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang yang merupakan kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan industri dalam memproduksi barang. Kenaikan inflasi yang terjadi akibat kebijakan kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005 banyak disebabkan faktor psikologis, dimana para pengusaha yang langsung berhubungan terhadap kebutuhan BBM akan ikut mengalami dampak dari kenaikan biaya produksi yang dilakukannya. Menurut Dartono (2006) bahwa akibat kenaikan harga BBM terjadi kenaikan barang-barang kebutuhan pokok dan produksi, ini dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Perkembangan Harga Barang Rumah Tangga dan Perusahaan**

Jenis Barang	Kenaikan Harga (%)	Jenis Barang	Kenaikan Harga (%)
Padi	0.23	Konstruksi	2.041
Sayuran	0.26	Perdagangan	1.025
Hasil Ternak	0.441	Restoran	0.821
Perikanan Laut	0.995	Hotel	0.767
Minyak Goreng	0.471	Angkutan Kereta Api	2.824
Beras	0.561	Angkutan Darat	4.117
Gula	0.65	Pelayaran	3.082
Pertambangan	0.798	Angkutan Air	4.21
Pupuk	0.537	Angkutan Udara	0.097
Industri Baja	0.916	Komunikasi	0.481
Listrik	0.08	Keuangan	0.522
Gas	0.325	Jasa-Jasa Lain	0.639
Air Bersih	0.477	.	.

Sumber: Hasil Simulasi Model CGE (Ikhsan dkk : 2005)

Kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan sangat tergantung pada kenaikan harga BBM sehingga mempengaruhi inflasi. Inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan cukup tinggi maka dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan juga tinggi. Berdasarkan hasil simulasi data Susenas 2002



menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM bulan Maret 2005 (asumsi inflasi sebesar 0.9%) adalah sebesar 0.24% (dari 16.25%-1649%) dan jika inflasi yang terjadi semakin besar maka angka kemiskinan juga akan membesar. Berdasarkan kenyataan diatas kemungkinan besar kenaikan BBM Oktober 2005 akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1% atau sekitar 2 juta orang. (Dartanto : 2006)

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah seluruh masyarakat miskin yang menerima subsidi langsung tunai BBM Tahap I dan Tahap II di Kecamatan Medan Labuhan. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*) dari jumlah populasi yang masyarakat yang menerima subsidi langsung tunai sebanyak 249 responden. Adapun jumlah sampel ditetapkan sebanyak 95 responden, yang berasal 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode observasi, wawancara langsung (*in-depth Interview*), diskusi kelompok terfokus dan survei terhadap, serta penyebaran angket kepada 95 responden. Metode survei dilakukan terhadap masyarakat yang memperoleh subsidi langsung tunai BBM.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa deskriptif. Adapun teknik analisi ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data tersebut kemudian dilakukan analisa antara teori dengan fakta dilapangan sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang kesimpulan data objek yang diteliti. Sementara itu juga dilakukan analisa dengan *Wilcoxon Match Pairs Test*. Untuk melihat perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah mendapat subsidi bantuan tunai BBM.

$$\begin{aligned}\tilde{T} &= \frac{n(n-1)}{4} \\ \dagger_T &= \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}} \\ Z &= \frac{T - \tilde{T}}{\dagger_T}\end{aligned}$$

T = Jumlah jenjang/rangking yang kecil.

## PEMBAHASAN

Kecamatan Medan Labuhan terletak di wilayah utara Kota Medan dengan luas 36,67 km<sup>2</sup> yang dibagi dalam 6 kelurahan dengan kepadatan penduduk 100.184 jiwa (Sensus, 2005). Adapun aktivitas penduduknya terdiri pembuatan produk prabot rumah tangga, pertanian, nelayan dan juga terdapat industri produksi inti sawit dan makanan ternak. Usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dan bekerjasama dengan instansi lain menyediakan sarana dan prasarana seperti sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, air bersih, penerangan dan telepon.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Medan (2006) jumlah rumah tangga miskin di Kota Medan sebanyak 88.758 (19,29%). Adapun jumlah rumah

tangga miskin yang terbanyak terdapat di tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Medan Belawan 13.440 rumah tangga, Kecamatan Medan Marelan 7.747 rumah tangga, dan Kecamatan Medan Labuhan 6.852 rumah tangga (BPS, 2006).

Dalam menetapkan ukuran angka kemiskinan terhadap setiap masyarakat miskin berdasarkan penetapan yang digariskan oleh BPS dan BKKBN adalah konsumsi setara 2.100 kilo kalori per prang per hari serta untuk memenuhi kebutuhan non-makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan barang/jasa lainnya. Secara umum terdapat batas garis kemiskinan yang ditetapkan dengan mengasumsikan satu rumah tangga dengan jumlah anggota 4 orang adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 4 x Rp. 120.000,- = Rp. 480.000,- per rumah tangga per bulan
2. Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp. 150.000,- = Rp. 600.000,- per rumah tangga per bulan
3. Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp. 175.000,- = Rp. 700.000,- per rumah tangga per bulan. (BPS Sumut, 2007)

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di atas, maka kategori keluarga miskin di Kecamatan Medan Labuhan yang berhak mendapatkan Subsidi Langsung Tunai (SLT) disebabkan kenaikan harga BBM adalah sebanyak 6.852 KK. Dalam mekanisme pendistribusian dana kompensasi BBM kepada masyarakat miskin di Kecamatan Medan Labuhan ditujukan untuk bidang pendidikan, kesehatan, beras murah, prasarana pedesaan, perumahan rakyat, pelayanan sosial, dana bergulir, kontrasepsi untuk keluarga berencana.

### **Kontribusi Subsidi Langsung Tunai**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Medan dari Kantor Cabang Medan Labuhan. Masyarakat yang berhak mendapatkan Subsidi Langsung Tunai dari kompensasi kenaikan BBM pada tahap III adalah sebanyak 6.852 rumah tangga yang tersebar di 6 kelurahan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 15,85% (1086/KK) jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin penerima Subsidi Tunai Langsung pada Tahap I sebanyak 5766/KK.

Melalui wawancara yang dilakukan pada kepala rumah tangga miskin yang menerima Subsidi Tunai Langsung di Kecamatan Medan Labuhan akibat kenaikan harga BBM ditemukan, bahwa biaya operasional yang dikeluarkan masyarakat miskin untuk kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan dalam hitungan standar, secara rata-rata adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Miskin**  
**di Kecamatan Medan Labuhan**

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah Biaya (Rp)</b>
Biaya makan	900.000,-
Biaya pendidikan	30.000,-
Biaya kesehatan	15.000,-
Biaya transportasi	135.000,-
Biaya listrik & air	35.000,-
Biaya lain-lain	100.000,-
<b>Total</b>	<b>1.215.000,-</b>

Sumber: Hasil Wawancara, 2007.

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah kebutuhan hidup yang dikeluarkan setiap kepala keluarga miskin selama 1 bulan adalah sebesar Rp. 1.215.000,- atau sebesar Rp. 14.580.000,- per tahun. Besarnya dana Subsidi Tunai Langsung yang diterima masyarakat miskin tidak mampu dalam menutupi kebutuhan hidup mereka selama 1 bulan. Hal ini didasarkan dari perhitungan kompensasi dari Subsidi Tunai Langsung yang mereka terima adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang diterima kepala keluarga miskin dalam 1 bulan sebesar Rp. 100.000,- per bulan
2. Pendapatan yang diterima kepala keluarga miskin selama 1 bulan antara rentang Rp. 600.000,- sampai Rp. 750.000,-
3. Biaya kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan selama 1 bulan sebesar Rp. 1.215.000,-.

Berdasarkan data di atas, maka dampak dari kenaikan harga BBM terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Medan Labuhan mengalami peningkatan sebesar Rp. 100.000,- per bulan dari Bantuan Subsidi Tunai Langsung menjadi 700.000,- sampai Rp. 850.000,-, sementara jumlah kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan masyarakat miskin adalah sebesar Rp. 1.215.000,- per bulan. Dalam perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa terjadi minus atau kekurangan biaya kebutuhan hidup masyarakat miskin sebesar Rp. 515.000,- (bila pendapatan Rp. 700.000,- per bulan setelah mendapatkan data Subsidi Tunai Langsung sementara biaya kebutuhan hidup yang harus dikeluarkan kepala keluarga masyarakat miskin sebesar Rp. 1.215.000,-) atau Rp. 365.000,- per bulan (bila pendapatan Rp. 850.000,- per bulan setelah mendapatkan data Subsidi Tunai Langsung sementara biaya kebutuhan hidup yang harus dikeluarkan kepala keluarga masyarakat miskin sebesar Rp. 1.215.000,-).

Fakta di atas memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan kekurangan biaya kebutuhan hidup keluarga masyarakat miskin dalam membiayai kebutuhan rumah tangga mereka selama 1 bulan setelah terjadinya kenaikan harga BBM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ternyata Bantuan Subsidi Tunai Langsung melalui kompensasi BBM yang digulirkan pemerintah dalam membantu

kebutuhan masyarakat miskin di Kecamatan Medan Labuhan tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap peningkatan biaya kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Dengan kata lain, Subsidi Tunai Langsung tidak dapat meningkatkan taraf kesejahteraan miskin di Kecamatan Medan Labuhan. Bahkan dampak dari kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah dapat berakibat pada menurunnya taraf kehidupan masyarakat miskin kepada masyarakat yang rentan pada masalah kemiskinan. Ini tentu pada akhirnya akan menjadikan masyarakat miskin secara sistematis akan mengalami kemiskinan atau termiskinkan secara terus-menerus akibat kebijakan kenaikan harga BBM.

Terjadinya proses pemiskinan masyarakat secara simultan dari kenaikan harga BBM akan mengakibatkan:

1. Munculnya kerawanan pangan dan masalah gizi buruk, hal ini disebabkan daya beli masyarakat rendah dalam membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Menurut data BPS tahun 2003 jumlah anak belita yang mengalami gizi buruk (kurang gizi) tercatat sebesar 27,5 % dari jumlah total anak balita yang terdapat di Indonesia, serta ditambah dengan perhatian dan pengetahuan masyarakat terhadap gizi yang baik sangat kurang.
2. Terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bila perhitungan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Bantuan Subsidi Tunai Langsung dari kompensasi kenaikan BBM yang dikemukakan dibawah ini:
  - a. Bantuan untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 235.000,- per tahun ( $\pm$  Rp. 20.000,- per bulan) untuk setiap siswa SD/MI, untuk setiap siswa SMP/MTs sebesar Rp. 365.000,- per tahun ( $\pm$  Rp. 30.000,- per bulan), dan untuk setiap siswa SMA/Aliyah diberikan Beasiswa Khusus Mandiri (BKM) sebesar Rp. 780.000,- per tahun (Rp. 65.000,- per bulan)
  - b. Bantuan untuk bidang kesehatan pada rumah tangga keluarga miskin sebesar Rp. 5.000,-/bulan/KK.

Besarnya Subsidi Tunai Langsung yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sampai saat ini tidak mampu menutupi kebutuhan biaya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sebab disamping uang sekolah yang harus dibayarkan, ternyata siswa juga harus mengeluarkan biaya operasional lainnya seperti peralatan sekolah, transportasi, uang saku dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bidang kesehatan, dari alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 5.000,-/bulan/KK secara umum tidak mampu memberikan bantuan kepada rumah tangga masyarakat miskin dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, karena biaya kesehatan untuk membeli obat, rawat inap, tambahan gizi dan sebagainya tidak akan mencukupi. Menurut data yang diperoleh dari Camat Medan Labuhan, jumlah masyarakat miskin yang telah mendapatkan kartu sehat dari kompensasi BBM hanya sebesar 67 % dari total keseluruhan dari masyarakat yang berhak mendapatkan kartu sehat tersebut.

3. Sistem perlindungan sosial yang diberikan pemerintah belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini terlihat dari data BPS Kota Medan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang menerima Subsidi Tunai Langsung sebanyak 30.098/KK dari semula 55.660/KK. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa akibat kenaikan harga BBM selama rentang waktu saat ini secara general telah terjadi

peningkatan masyarakat miskin di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Labuhan.

4. Kesempatan kerja mengalami keterbatasan akibat dari kenaikan harga BBM. Hal ini disebabkan aset yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman (kredit) dalam kegiatan modal usaha tidak tersedia, sehingga masyarakat miskin tidak mampu dalam membuka aktivitas usaha yang memungkinkan terbukanya kesempatan kerja dalam meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin.

Hasil penelaahan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa secara umum akibat kenaikan BBM belum memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, atau dalam pengertian bahwa kontribusi dari Bantuan Subsidi Tunai Langsung yang diterima masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan dalam membantu keluarga miskin untuk mengurangi beban hidup mereka, tidak memberikan kontribusi positif bagi pemecahan masalah kemiskinan.

Kesimpulan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Jawa Tengah dengan judul *“Kajian Evaluatif Dampak Pemanfaatan Kompensasi BBM di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Wilayah Minus di Jawa Tengah”*. Dalam hasil penelitian mereka dikemukakan bahwa penyaluran dana Subsidi Tunai Langsung, pendistribusian Kartu Sehat, dana BOS, dan dana BKM secara umum PKPS BBM telah meningkatkan konsumsi masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitas. Sementara itu dibidang pendidikan bantuan subsidi dapat mengurangi anak putus sekolah, serta meningkatkan semangat bersekolah bagi anak keluarga miskin (gakin), mengurangi sumbangan pengembangan institusi di daerah pedesaan.

Adapun dibidang kesehatan mendorong pola hidup sehat, membudayakan pengobatan modern. Sedangkan pemanfaatan Subsidi Tunai Langsung sebagian besar dimanfaatkan untuk kesehatan lainnya, termasuk untuk pendidikan modal usaha. Dalam pelayanan kesehatan sudah mencakup pada kebutuhan esensial penduduk miskin meski dalam perkembangan ditemukan penyakit diluar yang telah ditentukan oleh Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).

Perbedaan yang terjadi diantara hasil penelitian yang dilakukan pada 2 tempat yang berbeda tersebut telah memperlihatkan sistem dan operasional dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Tunai Langsung yang diterapkan pemerintah tidak dilakukan secara sistematis dan terencana secara baik dan matang. Sehingga perencanaan yang disusun tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah kemiskinan akibat dampak dari kenaikan harga BBM sehingga taraf kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, maka pemerintah perlu menyusun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin/desa untuk mendapatkan akses pendidikan secara layak dan gratis.
2. Perlunya redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang dengan tidak mengkonsentrasikan pada satu pihak atau satu kelompok.
3. Mendorong pengembangan investasi dalam sektor pertanian dan pertambangan pada daerah-daerah pedesaan.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk mendapatkan akses dalam memperoleh kredit usaha yang mudah.
5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat desa.

6. Memperkenalkan dan memberikan pelatihan dalam sistem pertanian modern dengan teknologi yang terbaru agar memudahkan masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai.
7. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit-unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa.
8. Memberikan jaminan asuransi dan sosial terhadap masyarakat desa.
9. Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan.
10. Mendorong agenda pembangunan daerah dengan memprioritaskan dalam pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas utama.

### **Efisiensi Subsidi Tunai Langsung**

Dalam pemberian Subsidi Tunai Langsung kepada rumah tangga keluarga miskin di Kecamatan Medan Labuhan adalah membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Dalam proses pemberian Bantuan Subsidi Tunai Langsung kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendistribusikan melalui 3 tahap dengan bantuan setiap kepala keluarga sebesar Rp. 300.000,- per tiga bulan. Adapun besarnya dana yang disalurkan tahap pertama untuk Bantuan Subsidi Tunai Langsung di Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp. 1.729.800.000,- dengan asumsi jumlah rumah tangga miskin yang mendapat subsidi sebanyak 5.766 kepala keluarga. Namun dana yang terealisasi didistribusikan adalah sebesar Rp. 1.684.500.000,- dengan jumlah keluarga Subsidi Tunai Langsung sebanyak 5.615/KK, sehingga terdapat sebanyak 151 kepala keluarga yang tidak menerima Subsidi Tunai Langsung. Sementara itu jumlah dana Subsidi Tunai Langsung yang disalurkan untuk tahap kedua sebesar Rp. 1.729.800.000,- dengan perkiraan jumlah rumah tangga miskin yang menerima Subsidi Tunai Langsung sebanyak 5.766 kepala keluarga. Namun realisasi bantuan Subsidi Tunai Langsung yang terdistribusi sebesar Rp. 1.708.500.000,- dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 5.696 kepala keluarga, sehingga terdapat 80 kepala keluarga rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Tunai Langsung. Untuk tahap akhir (tahap III) penyaluran dana Subsidi Tunai Langsung kepada rumah tangga miskin sebesar Rp. 2.055.600.000,- dengan perkiraan jumlah rumah tangga miskin yang menerima Subsidi Tunai Langsung sebanyak 6.852 kepala keluarga. Namun Bantuan Subsidi Tunai Langsung yang terdistribusi sebesar Rp. 2.017.800.000,- dengan jumlah rumah tangga miskin menerima Subsidi Tunai Langsung sebanyak 6.726 kepala keluarga, sehingga terdapat sebanyak 126 kepala keluarga yang tidak menerima bantuan Subsidi Tunai Langsung.

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas penyaluran Subsidi Tunai Langsung dari tahap awal sampai akhir ternyata telah terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan Subsidi Tunai Langsung yaitu sebesar 1.086 kepala keluarga. Peningkatan ini disebabkan oleh telah terjadinya penurunan terhadap pendapatan keluarga masyarakat miskin di Kecamatan Medan Labuhan akibat kenaikan BBM, didorong lagi dengan terjadinya kenaikan kebutuhan pokok masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat serta pengeluaran biaya operasional keluarga seperti biaya pendidikan, kesehatan dan transportasi yang meningkat.

Dalam melakukan pengukuran efisiensi penyaluran Subsidi Tunai Langsung terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan membandingkan rencana biaya yang akan disalurkan kepada kepala keluarga rumah tangga miskin dengan realisasi dana yang telah disalurkan. Jika nilai realisasi yang disalurkan lebih kecil dari dana yang diterima kepala keluarga rumah tangga miskin, maka dapat disimpulkan bahwa dana Subsidi Tunai Langsung tidak efisien. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Medan Labuhan terhadap jumlah dana Subsidi Tunai Langsung yang didistribusikan kepada rumah tangga keluarga miskin di 6 Kelurahan dalam 3 tahap dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Jumlah Dana Subsidi Tunai Langsung**

	<b>Anggaran Dana Subsidi Tunai Langsung</b>	<b>Realisasi Pendistribusian Subsidi Tunai Langsung</b>	<b>Selisih Anggaran Subsidi Tunai Langsung</b>
Tahap 1	1.729.800.000,-	1.684.500.000,-	45.300.000,-
Tahap 2	1.729.800.000,-	1.708.500.000,-	21.300.000,-
Tahap 3	2.055.600.000,-	2.017.800.000,-	37.800.000,-

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2007.

Berdasarkan data anggaran Subsidi Tunai Langsung yang dikeluarkan menunjukkan bahwa besarnya tingkat efisiensi anggaran yang dikeluarkan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada Tahap I, besarnya realisasi pendistribusian Bantuan Subsidi Tunai Langsung, dimana biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.684.500.000,- sementara selisih anggaran yang tidak terdistribusi sebesar Rp. 45.300.000,-. Maka besarnya selisih (output) dan realisasi (input) anggaran ditetapkan jumlah efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 2,69 %.
2. Pada Tahap II, besarnya realisasi pendistribusian Bantuan Subsidi Tunai Langsung, dimana biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.708.500.000,- sementara selisih anggaran yang tidak terdistribusi sebesar Rp. 21.300.000,-. Maka besarnya selisih (output) dan realisasi (input) anggaran ditetapkan jumlah efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 1,25%.
3. Pada Tahap III, besarnya realisasi pendistribusian Bantuan Subsidi Tunai Langsung, dimana biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.017.800.000,- sementara selisih anggaran yang tidak terdistribusi sebesar Rp. 37.800.000,-. Maka besarnya selisih (output) dan realisasi (input) anggaran ditetapkan jumlah efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 1,87%.

### **Uji Perbedaan**

Dalam melakukan pengujian kondisi kemiskinan masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana Subsidi Tunai Langsung dapat dilakukan dengan menggunakan analisa Wilcoxon Match Pairs Test. Dimana hasil yang diperoleh nilai  $Z_{hitung}$  sebesar 2,850, dengan taraf kesalahan sebesar 0,05 (...), maka  $Z_{tabel}$  diperoleh sebesar 1,645. Dengan demikian dapat disimpulkan  $Z_{hitung}$  lebih besar dari  $Z_{tabel}$  ( $2,850 > 1,645$ ). Maka kesimpulan

yang diperoleh adalah penyaluran Subsidi Tunai Langsung terhadap rumah tangga keluarga miskin di Kecamatan Medan Labuhan tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Dengan pengertian, walaupun masyarakat menerima Subsidi Tunai Langsung, namun kondisi kehidupan rumah tangga masyarakat miskin di Kecamatan Medan Labuhan tetap miskin. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Oktaviani (Chotib Bisri, 2005) yang mengatakan bahwa walau telah dilakukan penyaluran dana kompensasi dengan asumsi dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tidak mengalami kebocoran, tetap tidak akan mengurangi rakyat miskin. Bahkan daya beli masyarakat tetap mengalami penurunan karena inflasi mengalami peningkatan dari kenaikan harga-harga.

## KESIMPULAN

Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara umum belum memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam pengertian kontribusi bantuan Subsidi Langsung Tunai di Kecamatan Medan Labuhan tidak dapat mengurangi beban hidup keluarga miskin. Sehingga kondisi hidup masyarakat miskin di 6 Kelurahan di Kecamatan Medan Labuhan tidak mengalami perubahan atau dalam pengertian tetap miskin. Pendistribusian dana Subsidi Langsung Tunai pada rumah tangga miskin di Kecamatan Medan Labuhan secara umum mengalami penyimpangan dimana pendistribusian dana yang akan disalurkan pemerintah tidak seluruhnya diterima rumah tangga miskin di Kecamatan Medan Labuhan, sehingga anggaran dana Subsidi Langsung Tunai yang tersedia dengan realisasi pendistribusian dana mengalami selisih.

Adapun kondisi kehidupan rumah tangga miskin di Kecamatan Medan Labuhan tidak mengalami perbedaan walaupun menerima dana Subsidi Langsung Tunai dari kenaikan harga BBM. Dalam pengertian bahwa walaupun masyarakat menerima Subsidi Langsung Tunai, kondisi kehidupan rumah tangga miskin tidak berubah atau tetap miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dendi Ramdani, *Perluakah Dana Kompensasi BBM ?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/opini/1652204.htm>), dikunjungi tanggal 13 Maret 2006.
- Gunawan Sumodoningrat ; *Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan*, Lembaga Pengabdian Masyarakat Ugm 2002.
- Hady Sutjipto, *Mengkritisi Kebijakan Dana "Kompensasi BBM"*, Mengkritisi Kebijakan Dana 'Kompensasi BBM' <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaie&id=17>), dikunjungi tanggal 13 Maret 2006.
- Ikhsan, Dartanto, Usman, dan Herman, 2005, *Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan*, Working Paper:LPEM FEUI.
- Iman Sugema, *Benarkah Kajian yang Dibuat LPEM?* [http://www.geocities.com/oomi\\_yeah/subsididebate.pdf+Teori+Kompensasi&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=16](http://www.geocities.com/oomi_yeah/subsididebate.pdf+Teori+Kompensasi&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=16), dikunjungi 18 Maret 2006
- Investor Daily Online, *Kompensasi BBM Belum Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat*, [http://old.infid.org/news\\_detail.php?catagori=&id=107](http://old.infid.org/news_detail.php?catagori=&id=107), dikunjungi tanggal 13 Maret 2006.



- M. Suparmoko, 2003, “*Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*”, Edisi Ke-5, Yogyakarta : BPFE.
- Makmun, *Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol.7 No. 2, Juni 2003.
- Mohamad Ikhsan, *Kenaikan Harga BBM dan Kemiskinan : Tanggapan Atas Tanggapan*, [http://kolom.pacific.net.id/ind/lain-lain/mohamad\\_ikhsan/kenaikan\\_harga\\_bbm\\_dan\\_kemiskinan:tanggapan\\_atas\\_tanggapan.html](http://kolom.pacific.net.id/ind/lain-lain/mohamad_ikhsan/kenaikan_harga_bbm_dan_kemiskinan:tanggapan_atas_tanggapan.html), dikunjungi tanggal 13 Maret 2006.
- Muhammad Chatib Basri, *Kenaikan Harga BBM : Model LPEM dan Bukti Empiris Sebuah Tanggapan* [http: www.geocities.com/oomi\\_yeah/subsididebate.pdf](http://www.geocities.com/oomi_yeah/subsididebate.pdf)+ Teori+Kompensasi&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=16, dikunjungi tanggal 18 Maret 2006.
- Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE Yogyakarta, 2001.
- Robinson, Marguirete, 2003, *The Micro Finance Revolution, Sustainable Finance For The Poor*, The World Bank.
- Rudi Handoko & Pandu Patriadi, *Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM*, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 9, Nomor 4, Desember 2005
- Syahrir Soekardi, *Kontroversi Dana Kompensasi BBM*, **Error! Hyperlink reference not valid.**, dikunjungi tanggal 13 Maret 2006.
- Teguh Dartanto, *BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia*, dikunjungi tanggal 18 Maret 2006.
- World Bank, *Indonesia Constructing A New Strategy For Poverty Reduction*, World Bank, Washington DC, 2001.